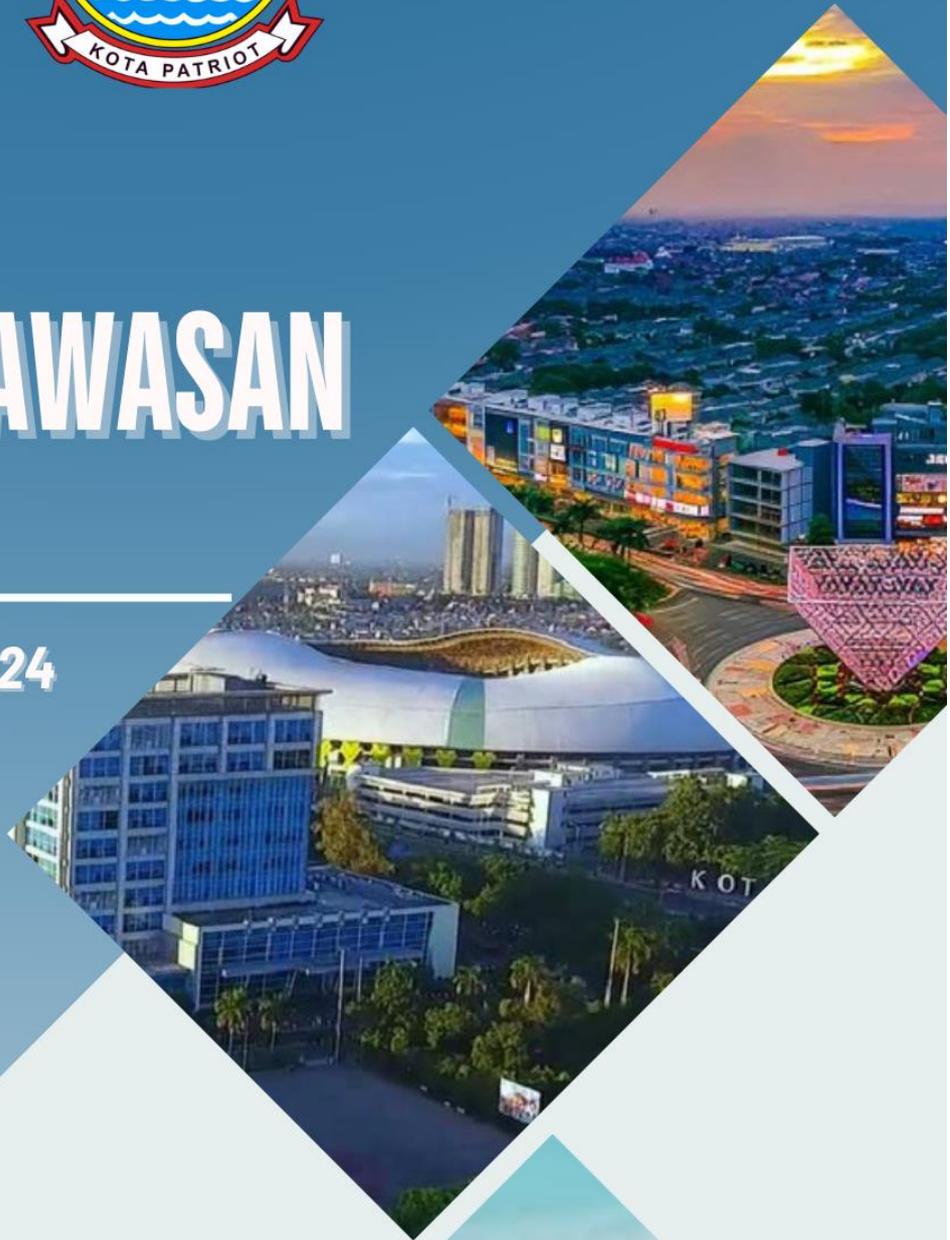




IKHTISAR HASIL PENGAWASAN

SEMESTER II TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan "Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2024" ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Penyampaian dan pelaporan atas Ikhtisar ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024 ini merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kota Bekasi selama Tahun 2024.

Semoga Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan capaian target kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024 ini.

Bekasi, Februari 2025

Inspektur Kota Bekasi



Iis Wisnuwati S.Sos., CRA., CRP., CGCAE., QGIA

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680731 198803 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I INFORMASI UMUM	
A. Dasar Hukum	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	6
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	6
BAB II HASIL PENGAWASAN	
A. Audit	50
B. Reviu	69
C. Evaluasi	79
D. Pemantauan	81
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	82
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	85
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	88
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bekasi	89
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat	92
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	
A. Simpulan	98
B. Hambatan	98
C. Rekomendasi	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program Kerja Pengawasan Dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun Anggaran 2024
Tabel 2	Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun Anggaran 2024
Tabel 3	Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun Anggaran 2024
Tabel 4	Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2024
Tabel 5	Jumlah Obyek Audit Investigatif Tahun 2024
Tabel 6	Audit Investigatif Yang Dilimpahkan Ke Instansi Penyidik Tahun 2024
Tabel 7	Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Tahun 2024
Tabel 8	Kode Etik Dan Standar Audit Yang Digunakan
Tabel 9	Jumlah Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Tahun 2024
Tabel 10	Jumlah Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Tabel 11	Reviu Dokumen Perencanaan Tahun 2024
Tabel 12	Reviu Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024
Tabel 13	Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024
Tabel 14	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023
Tabel 15	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023
Tabel 16	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Tabel 17	Realisasi Kegiatan Pengawasan Lainnya Pada Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024
Tabel 18	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2024
Tabel 19	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2024
Tabel 20	Rekapitulasi Kerugian Daerah Kota Bekasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2024
Tabel 21	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Bekasi Tahun 2024
Tabel 22	Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024
Tabel 23	Audit Tujuan Tertentu Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024
Diagram 2	Audit Tujuan Tertentu
Diagram 3	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal
Diagram 4	Persentase Tindak Lanjut Temuan Intern
Diagram 5	Jenis Pengaduan Masyarakat
Diagram 6	Jumlah Objek Pengaduan



BAB I

INFORMASI UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh perangkat-perangkat daerah yang saling bersinergi sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka kinerja perangkat daerah harus selalu ditingkatkan salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

A. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
 12. Keputusan Wali Kota Nomor 700.1/Kep.224-ITKO/IV/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

B. Tugas dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), Inspektorat Daerah Kota Bekasi merumuskan kembali tugas pokok sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan.



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Tugas Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.

2. Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretaris membawahkan:

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi diluar pengawasan, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Tugas Inspektur Pembantu Wilayah

a. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan



pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup Asisten Pemerintahan.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian.

d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah

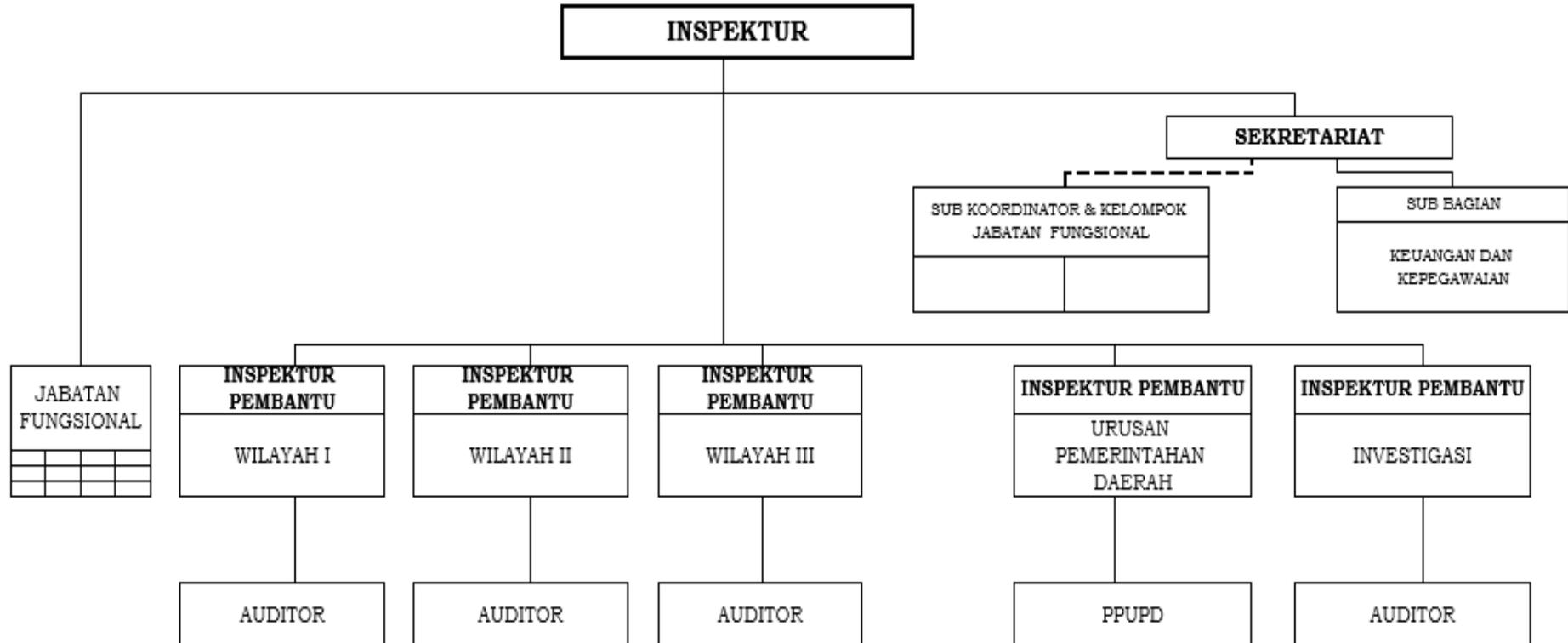
Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintah daerah.

e. Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan investigasi terhadap urusan pemerintah daerah.



Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI





C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh yang meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.
2. Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara Pengawasan APIP Pusat dan Daerah, disamping juga untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi tingkat nasional dan provinsi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.

D. Program Pengawasan dan Realisasi

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, pendampingan dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam melaksanakan pengawasan intern Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 700.1/Kep.224-ITKO/IV/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyusunan PKPT, Inspektorat menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko (*Risk Audit Based*), dengan tujuan untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan berisiko tinggi yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Selain itu, akan sangat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara paling efektif.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Sedangkan untuk Program Non PKPT adalah pengawasan yang dilakukan atas mandatory dari kepala daerah, permintaan dari stakeholder maupun pengawasan yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat. Gambaran tentang program pengawasan dan realisasi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:



Tabel 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun Anggaran 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AUDIT						
	Audit Kinerja						
	1. Laporan Hasil Audit Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2024 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	1	39.218.618.790	1	23.799.671.929	-	-
	2. Laporan Hasil Audit Kinerja atas Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	37.377.658.760	1	23.202.715.779	-	-
	3. Laporan Hasil Audit Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	70.981.906.000	1	20.788.353.475	-	-
	4. Laporan Hasil Audit Kinerja Pengendalian Inflasi	1	-	-	-	-	-
	5. Laporan Hasil Audit Kinerja Investasi	1	-	-	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Audit Dengan Tujuan Tertentu						
	1. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	3	-	3	-	-	-
	2. Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Printer dan TV pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menggunakan Dana BOS Pusat SMPN Se-Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021	-	-	-	-	1	213.296.225
	3. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Obyek Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) Pasar Pondok Gede pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
	4. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Bidang Perencanaan dan Jasa Konsultansi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	-	-	-	-	1	6.910.083.850
	5. Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Komunikasi,	-	-	-	-	1	828.714.000



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023						
6.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	-	-	-	-	1	4.979.055.000
7.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Bekasi	6	183.882.336.767	6	105.840.489.290	-	-
8.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Bekasi	1	782.000.945.767	1	62.379.195.762	-	-
9.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu pada Kegiatan Pengadaan Baktor Sumber Dana Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	-	-	-	-	1	5.705.700.000
10.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Se	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelurahan pada Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023						
	11. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	-	-
	12. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	800.000.000	1	800.000.000	-	-
	13. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu Bantuan Hibah KONI Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	-	-	-	-	1	49.163.951.948
	14. Laporan Audit Tujuan Tertentu Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	1	58.861.915.583	1	58.861.915.583	-	-
	15. Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu Pekerjaan Kegiatan	-	-	-	-	1	4.277.852.840



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Sumur Resapan Se-Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi						
16.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pekerjaan <i>Sheet pile</i> Jalan Alinda Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	-	-	-	-	1	8.431.766.361
17.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Komputer <i>All In One</i> dan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi	-	-	-	-	1	7.594.000.000
18.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diserahkan kepada Individu pada Dinas Sosial Kota Bekasi TA 2024	1	1.200.000.000	1	1.068.000.000	-	-
19.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pekerjaan Lanjutan Pemeliharaan Jalan Pangkalan 6 Kel. Ciketing Udik TA 2024 pada DBMSDA Kota Bekasi	1	2.584.451.300	1	2.584.451.300	-	-
20.	Laporan Hasil Audit Atas Anggaran Honorarium Kegiatan yang Bersumber Bantuan Keuangan	-	-	-	-	1	12.146.200.000



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi						
	Audit Ketaatan						
	1. Laporan Hasil E-Audit Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan <i>Building Management</i> Tahun Anggaran 2023 pada RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi	1	25.000.000.000	1	24.999.991.482	-	-
	2. Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Perjanjian Pengelolaan Parkir RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT Cipta Surya Sejati	-	-	-	-	1	6.663.846.899
	3. Laporan Hasil Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diLingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 pada Diskominfostandi Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	4. Laporan Hasil Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 pada RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Laporan Hasil Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 pada RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi dan Diskominfostandi Kota Bekasi	2	-	2	-	-	-
6.	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Realisasi Anggaran Belanja Honorarium pada Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	-	-
7.	Laporan Hasil Audit Kepatuhan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 pada Satpol PP Kota Bekasi	1	9.732.800.000	1	4.639.770.857	-	-
8.	Laporan Hasil Audit Ketaatan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bankeu DKI) pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	769.200.000	1	248.550.000	-	-
9.	Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	1	34.445.202.150	1	19.159.212.087	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	10. Laporan Hasil Audit Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi	1	65.857.786.844	1	36.471.034.086	-	-
	11. Laporan Hasil Audit Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi	1	7.760.160.300	1	2.775.970.148	-	-
	12. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Pengelolaan <i>E-Government</i> di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	13. Audit Tujuan Tertentu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	-	-	-	-	-
	14. Audit Tujuan Tertentu Program Pengendalian Penduduk	1	-	-	-	-	-
	15. Audit Tujuan Tertentu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	-	-	-	-	-
	16. Audit Tujuan Tertentu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	-	-	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
B	REVIU						
	1. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	-	1	-	-	-
	2. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	44	-	44	-	-	-
	3. Laporan Hasil Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 3 Tahun Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	2.114.221.000	1	2.114.221.000	-	-
	4. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana Tahap 3 Tahun Anggaran 2023 pada DPPPA Kota Bekasi DAK Penugasan DPPKB	1	976.200.000	1	976.200.000	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023	5	5.598.350.000	5	5.598.350.000	-	-
	6. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah di Kota Bekasi Sampai Dengan 31 Desember 2023	44	-	44	-	-	-
	7. Laporan Hasil Reviu Pengakuan Utang Beban Penggantian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi atas LKM-NIK Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi	-	-	-	-	1	879.495.091
	8. Laporan Hasil Reviu atas Penggunaan BTT untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Sewa Pemakaian Stadion PCB Tahun Anggaran 2024 Pada Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi	-	-	-	-	2	375.650.000
	9. Laporan Hasil Reviu Daftar Calon Penerima Manfaat Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	10. Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Laporan	1	-	1	-	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Bekasi Tahun 2023						
11.	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	-	1	-	-	-
12.	Laporan Hasil Reviu atas Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengakuan Utang atas Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada DBMSDA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	-	-	-	-	1	149.553.840
13.	Laporan Hasil Reviu LKPD Pemda Kota Bekasi TA 2023	44	-	44	-	-	-
14.	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga Atas Restitusi PBB a.n. Widyarningsih	-	-	-	-	1	1.606.030
15.	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Julianto Perdamean Sinaga	-	-	-	-	1	17.000.000
16.	Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang	1	1.339.768.400.455	1	505.220.722.281	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Jasa Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bekasi						
17.	Laporan Hasil Reviu Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023	1	8.341.605.000	1	8.341.605.000	-	-
18.	Laporan Hasil Reviu Draft Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025	1	-	1	-	-	-
19.	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Kanta	-	-	-	-	1	10.595.200
20.	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Cakem	-	-	-	-	1	1.640.000
21.	Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Kelebihan	-	-	-	-	1	16.511.200



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. lin						
22.	Laporan Hasil Reviu Pemanfaatan Lahan oleh PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk pada Pemerintah Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
23.	Laporan Hasil Reviu atas Kinerja Pegawai Harian Lepas (PHL) Pekerjaan Pembersihan Kali Asem Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang TA 2024 pada DLH Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
24.	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025 - 2045	1	-	1	-	-	-
25.	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025	1	-	1	-	-	-
26.	Laporan Hasil Reviu Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025	1	-	1	-	-	-
27.	Laporan Hasil Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Bantuan Keuangan Organisasi	-	-	-	-	1	150.000.000



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024						
	28. Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025	1	-	1	-	-	-
	29. Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	30. Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	3.421.992.761.333	1	2.270.673.316.136	1	-
	31. Laporan Hasil Reviu Perjanjian Kerjasama Antara PT Mitra Patriot (PERSERODA) Dengan Perum Damri Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Angkutan Umum Massal Bersubsidi Trans Patriot Tahun 2024	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	32. Laporan Hasil Reviu Optimalisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	1	2.687.391.884.000	1	846.430.773.638	-	-
	33. Laporan Hasil Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	34. Nota Dinas Telaahan Restitusi Pajak	-	-	-	-	1	-
	35. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame a.n. CV Sari Rasa Nusantara (Charles Philipus Siregar)	-	-	-	-	1	943.370
	36. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Johannes Gunadi	-	-	-	-	1	91.840.000
	37. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga atas Restitusi PBB a.n. Puti Indahari	-	-	-	-	1	433.930



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	38. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Aulia Tsani Azizulhakim	-	-	-	-	1	152.000.000
	39. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Aulia Tsani Azizulhakim	-	-	-	-	1	127.595.000
	40. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame a.n. CV Sari Rasa Nusantara (Charles Philipus Siregar)	-	-	-	-	1	4.591.400
	41. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a.n. Ani CS	-	-	-	-	1	645.600
	42. Laporan Hasil Reviu Penggunaan Belanja Tidak Terduga atas Restitusi	-	-	-	-	1	6.187.347



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PBB an. Angelina Maria Magdalena (PT Taman Puri Indah)						
	43. Laporan Hasil Reviu RKPD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025	44	-	44	-	-	-
	44. Nota Dinas Laporan Hasil Reviu RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025	1	-	1	-	-	-
	45. Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SDN di Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	46. Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	47. Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I APBD Kota Bekasi dan Prognosis TA 2024	1	-	1	-	-	-
	48. Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	-	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	49. Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	50. Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	44	-	44	-	-	-
	51. Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	52. Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	44	-	44	-	-	-
	53. Reviu Atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2024	1	1.778.443.000.000	1	1.065.400.237.174,62	-	-
	54. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025	44	-	44	-	-	-
	55. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap I Tahun Anggaran 2024						
	56. Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Paud	1	363.624.750	1	343.983.000	-	-
	57. Laporan Hasil Reviu DAK Fisik SD	1	1.354.919.250	1	1.321.111.300	-	-
	58. Laporan Hasil Reviu DAK Fisik SMP	1	498.349.250	1	443.453.889	-	-
	59. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi Tahap I Tahun Anggaran 2024	1	550.212.500	1	543.750.000	-	-
	60. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap I Tahun Anggaran 2024	1	376.275.000	1	339.430.712	-	-
	61. Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bekasi	1	5.527.236.087.640	1	3.797.152.711.805	-	-
	62. Laporan Hasil Pengawasan terhadap Ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atas	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024						
63.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
64.	Laporan Hasil Reviu atas Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.7.1/KEP.216-DLH/IV/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintahan yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pertanggungjawaban Keuangannya	1	-	1	-	-	-
65.	Laporan Hasil Reviu atas Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) Pasar Kranji Baru Kota Bekasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	66. Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 pada Tahap Perencanaan dan Seleksi Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	67. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi Tahap 2 TA 2024	1	1.540.595.000	1	1.505.700.000	-	-
	68. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan DAK Fisik PAUD	1	1.018.149.299	1	1.002.749.000	-	-
	69. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan DAK Fisik SD	1	3.793.773.899	1	3.567.881.100	-	-
	70. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan DAK Fisik SMP	1	1.395.377.900	1	1.355.933.730	-	-
	71. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian	1	746.937.500	1	746.937.500	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan DAK Fisik SKB						
	72. Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 pada Tahap Seleksi Kompetensi Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	73. Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap 2 Tahun Anggaran 2024	1	1.326.837.300	1	1.326.837.300	-	-
	74. Reviu Atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Semester II Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	75. Laporan Hasil Reviu Daftar Calon Penerima Manfaat Pada Perusahaan Umum Air Minum (Perumda) Tirta Patriot Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	-	-	-	-	1	-
	76. Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bekasi						
	77. Laporan Hasil Reviu Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (<i>Output</i>) 2024	1	-	1	-	-	-
C	Evaluasi						
	1. Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	44	-	44	-	-	-
	2. Laporan Hasil Evaluasi Pasar Jatiyah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	3. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	44	-	44	-	-	-
	4. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	5. Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko SPBE Kota Bekasi	5	-	5	-	-	-
	6. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	20	-	20	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Unit Kerja Layanan	1	-	1	-	-	-
	8. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (<i>On Going</i>) Tahun 2024 Triwulan I	1	-	1	-	-	-
	9. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (<i>On Going</i>) Tahun 2024 Triwulan II	1	-	1	-	-	-
	10. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (<i>On Going</i>) Tahun 2024 Triwulan III	1	-	1	-	-	-
	11. Laporan Hasil Evaluasi Kuantitas Alat Olahraga yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
D	Pemantauan						
	1. Laporan Hasil Stock Opname Persediaan Semester II Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	44	-	44	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Laporan Hasil Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024	49	-	49	-	-	-
3.	Laporan Pengawasan Pengadaan PPPK tahun 2023 Tahap Pengangkatan PPPK pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
4.	Monitoring P3DN Bulan April 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
5.	Monitoring P3DN Bulan Mei 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
6.	Monitoring P3DN Bulan Juni 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
7.	Monitoring P3DN Bulan Juli 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
8.	Monitoring P3DN Bulan Agustus 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
9.	Monitoring P3DN Bulan September 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
10.	Monitoring P3DN Bulan Oktober 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
11.	Monitoring P3DN Bulan November 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	12. Monitoring atas Pengisian Kueisioner Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK) Program P3DN Kota Bekasi Tahun 2024	1	-	1	-	-	-
	13. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	44	-	44	-	-	-
	14. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada PT Bank Syariah Patriot (Perseroda) Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	15. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	16. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada PT Mitra Patriot Bekasi (Perseroda)	1	-	1	-	-	-
	17. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda)	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada PT Migas (Perseroda)	1	-	1	-	-	-
19.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
20.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
21.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPG Semester I Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
22.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024 pada PT Bank Syariah Patriot (PERSERODA) Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
23.	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Semester II Tahun 2024 pada Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi						
	24. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024 pada PT Mitra Patriot (PERSERODA)	1	-	1	-	-	-
	25. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024 pada PT Sinergi Patriot Bekasi (PERSERODA)	1	-	1	-	-	-
	26. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024 pada PT Migas (PERSERODA)	1	-	1	-	-	-
	27. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	28. Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh paket pengadaan barang	1	APBD & APBDP TA 2024	1	APBD & APBDP TA 2024	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Bekasi TA 2024						
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya						
	1. Pendampingan pada Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari (DAK) TA 2024 pada RSUD Kelas D Pondokgede Dinas Kesehatan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2. Evaluasi atas Pengakuan atas Penundaan Pembayaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2023 pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid	1	-	1	-	-	-
	3. Pendampingan BPK Perwakilan Prov. Jabar Selama Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi TA 2023	1	-	1	-	-	-
	4. Pendampingan untuk Pengadaan Kegiatan TA 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	5. Pendampingan Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pembangunan Poli Spesialis yang Bersumber Dana	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DAK Fisik TA 2024 pada RSUD Kelas D Jatisampurna Kota Bekasi						
	6. Telaah Sejawat antar Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	7. Pembahasan atas Konsep Naskah Dinas tentang Keputusan Wali Kota Keberatan atas Lokasi Rencana Pembangunan dan Keputusan Wali Kota Tim Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	8. Evaluasi atas Mekanisme Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Utang pada BPKAD Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	9. Pendapat Terkait Pembayaran Gaji PHL Tenaga Kebersihan Kali Asem pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	10. Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa RSUD Kelas D Pondokgede Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2024	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	11. Laporan Hasil Pendampingan Dalam Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai BLUD UPTD PALD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi TA 2024	1	-	1	-	-	-
	12. Nota Dinas Telaah Dokumen Perpanjangan Sewa Barang Milik Daerah berupa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum Milik Pemerintah Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	13. Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Ambulance Jenazah Secara <i>E-Catalog</i> pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	14. Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Meubelair Secara <i>E-Catalog</i> Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	15. Telaah Dokumen Penetapan Program Penggratisan Biaya Pemasangan bagi Calon Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot yang Berasal dari Proyek Strategis Nasional	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I						
16.	Nota Dinas Telaah Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
17.	Laporan Hasil Analisis Karakteristik Pengelolaan Pegawai (ASN dan Non ASN) Pada Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi Tahun 2023-2024	-	-	-	-	1	-
18.	Laporan Hasil Analisis Karakteristik Paket Pekerjaan Belanja Obat-obatan di RSUD Teluk Pucung Kota Bekasi Dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024	-	-	-	-	1	-
19.	Laporan Hasil Analisis Karakteristik Pola Pengelolaan Kegiatan TA. 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	-	-	-	-	1	-
20.	Laporan Hasil Pengamatan dan Inspeksi Mendadak Pada Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
21.	Laporan Pemberian Keterangan Saksi Perkara 91/2024/PTUN.Bdg	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	22. Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi	1	-	1	-	-	-
	2. Klarifikasi						
	2.1 Klarifikasi Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pungutan Liar di TKN 6 Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.2 Klarifikasi Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pungutan Liar di SMPN 17 Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.3 Klarifikasi pengaduan masyarakat atas pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.4 Klarifikasi pengaduan masyarakat atas pungutan liar Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.5 Klarifikasi Kepada DBMSDA Kota Bekasi terkait Kegiatan Pelebaran Jalan dan Pembangunan Saluran Air /U-Ditch di Jalan Pangkalan	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Kec. Bantargebang Tahun 2022						
	2.6 Klarifikasi atas Laporan dan/atau Pengaduan Terkait Dugaan Pelanggaran kode Etik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.7 Klarifikasi/Permintaan Keterangan atas Pengaduan Masyarakat (H. Oom Sahroni) terkait Respon Negatif Lurah Bantargebang Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.8 Klarifikasi/Permintaan Keterangan atas Pengaduan masyarakat pada kegiatan Belanja Modal Pembangunan dan Penataan Ruang Gedung Bapenda Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.9 Klarifikasi atas Laporan Masyarakat pada Aplikasi "SP4N-LAPOR!" berkaitan dengan SKP PT Manesa Green Abadi	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT		
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2.10	Klarifikasi atas Dugaan Suap Staf Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	2.11	Klarifikasi atas Dugaan Perbuatan Curang Pembangunan Pagar dan Aula Kantor Kel. Kota Baru	1	-	1	-	-	-
	2.12	Klarifikasi ke RSUD Pondok Gede Kota Bekasi atas Laporan Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP)	1	-	1	-	-	-
	2.13	Klarifikasi atas Pengaduan dari Law Office Yasin Hasan Bhayangkara & Partners terkait Dugaan Mafia Pajak oleh Oknum Mantan Tenaga Kerja Kontrak Bapenda dan Petugas Ukur Pertanahan Kota Bekasi.	1	-	1	-	-	-
3.	Telaah Staf							
	3.1	Atensi atas Tahapan Penyusunan Perubahan	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024						
	3.2 Telaah Dokumen Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Kota Bekasi kepada PT Berkah Anugrah Pratama	1	-	1	-	-	-
	3.3 Telaah Dokumen Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengelola SPAM pada Kawasan Summarecon	1	-	1	-	-	-
	3.4 Telaah Dokumen Permohonan Penetapan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot Tahun Buku 2023	1	-	1	-	-	-
	3.5 Telaah staf terhadap eksistensi PT Mitra Patriot Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
4.	Telaah Awal						
	4.1 Telaah awal atas dugaan pungutan liar di SDN Jatimakmur V Kecamatan	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pondok Gede dan SDN Jatirahayu V Kecamatan Pondok Melati						
	4.2 Telaah awal atas dugaan pungutan liar terhadap pedagang yang dilakukan oleh pihak Kec. Bekasi Barat	1	-	1	-	-	-
	4.3 Telaah Awal Pekerjaan Belanja Computer <i>All in One</i> Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan	1	-	1	-	-	-
	4.4 Telaah Awal Pekerjaan Belanja Modal Mebel dan Perabot Ruang Kelas Kegiatan Mebel Sekolah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	4.5 Telaah Awal Pekerjaan Pemeliharaan Halte pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT		
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4.6	Telaah awal Pekerjaan Penataan Pedestrian Jalan Mayor Oking Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	4.7	Telaah awal terhadap dugaan mark up harga pada pengadaan barang /jasa di RSUD Tipe D Bantargebang Dinas Kesehatan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	4.8	Telaah awal terkait dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat pada SMPN 16 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	4.9	Telaah Awal terhadap Dugaan Pungutan Liar dalam Proses Program PTSL di Kel. Medansatria Kecamatan Medan Satria	1	-	1	-	-	-
	4.10	Telaah awal terkait Paket Pengadaan Mebel pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.11 Telaahan Draft Dokumen Kepwal tentang Juknis Pemberian Beasiswa Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1	-	1	-	-	-
	4.12 Menyusun Tanggapan dan Saran Terhadap Surat Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa Setda Kota Bekasi tentang Perhitungan SKP (Sisa Kemampuan Paket) pada Pekerjaan Konstruksi	1	-	1	-	-	-
	4.13 Telaahan Konsep Naskah Dinas Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Juknis Pemberian dan Penggunaan Dana Beasiswa Paket C Dinas Pendidikan Kota Bekasi TA 2024	1	-	1	-	-	-
	5. Konsultasi						
	5.1 Pembahasan atas Konsep naskah Dinas tentang Keputusan Wali Keberatan atas Lokasi Rencana Pembangunan dan Kepwal	1	-	1	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tim Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum di Lingkungan Pemkot Bekasi						
6.	Kapabilitas APIP						
	6.1 Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)	-	-	-	-	-	-
	6.2 Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	-	-	-	-	-	-
	6.3 Sertifikasi Bagi PPUPD	-	-	-	-	-	-
	6.4 Diklat Audit Kinerja	-	-	-	-	-	-
	6.5 Bimtek Penyusunan Dokumen Manajemen risiko SPBE	-	-	-	-	-	-
	6.6 Bimtek Penyusunan dan Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-
	6.7 Workshop Pemeriksaan Infrastruktur Jalan (Uji Kualitas dan Kuantitas)	-	-	-	-	-	-
	6.8 Workshop Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.9 Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	-	-	-	-	-	-
	6.10 Workshop Evaluasi Pendapatan	-	-	-	-	-	-
	6.11 Workshop Pengawasan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-
	6.12 Workshop Evaluasi Pengawasan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	6.13 Bimtek Reviu Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	6.14 Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-
	6.15 Bimtek Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	-	-	-
	6.16 Workshop Pengawasan Terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	6.17 Bimtek Audit Teknologi Informasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
	6.18 Diklat Bagi Auditor Pertama	-	-	-	-	-	-

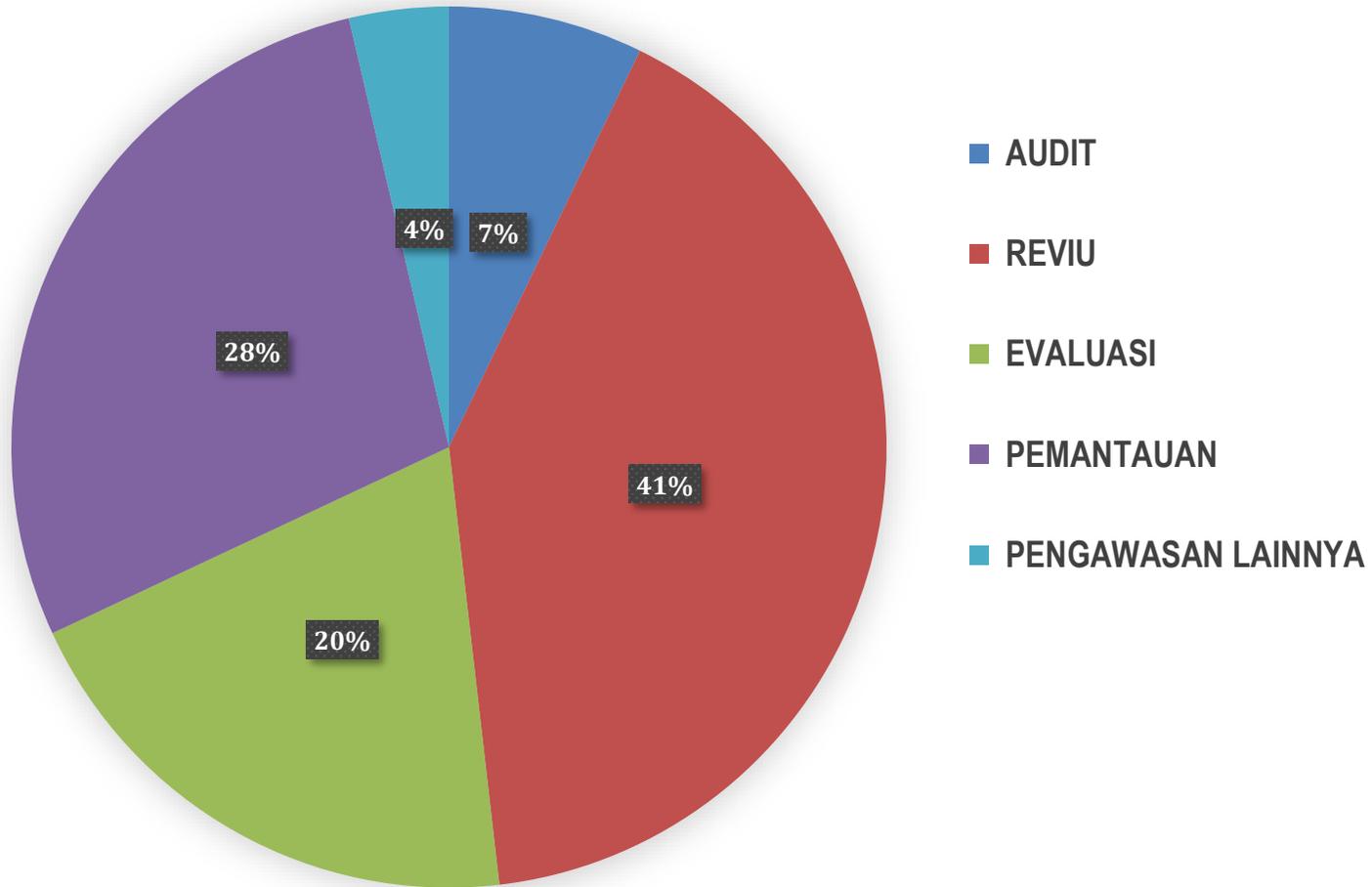


Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PKPT				NON - PKPT	
		TARGET PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN		REALISASI PENGAWASAN	
		JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)	JUMLAH OP	JUMLAH DANA OP YANG DIAWASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.19 Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-
	6.20 Diklat Kesekretariatan	-	-	-	-	-	-



Diagram 1
Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024





BAB II HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat sebagai auditor intern Pemerintah Kota Bekasi melakukan kegiatan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 disajikan sebagaimana uraian di bawah ini :

A. AUDIT

1. Audit Kinerja

Audit kinerja sering juga disebut *Value Money Audit*. Audit kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pemeriksaan ini lazim dilakukan oleh aparat pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait perbaikan kinerja untuk mengurangi/ menghilangkan/ memulihkan dampak permasalahan, dan perbaikan *Governance Risk Compliance (GRC)* atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta aspek ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil audit kinerja adalah temuan, simpulan, dan rekomendasi atas perbaikan *Governance Risk Compliance (GRC)* atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta aspek ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah melakukan audit kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Temuan Hasil Audit Kinerja
Tahun Anggaran 2024

NO	SUB KELOMPOK TEMUAN*)	KODE TEMUAN	JUMLAH KEJADIAN	(%)	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00	-	-	-
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang	1.01.00	2	5,56	2.760.000,00



NO	SUB KELOMPOK TEMUAN*)	KODE TEMUAN	JUMLAH KEJADIAN	(%)	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah				
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	-	-	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	-	-	-
4	Administrasi	1.04.00	12	33,33	47.334.000,00
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-
	Subtotal Kejadian		-	-	-
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00	-	-	-
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	-	-	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	9	25,00	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	1	2,78	-
	Subtotal Kejadian		-	-	-
III	Temuan 3 E	3.00.00	-	-	-
1	Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan	3.01.00	2	5,56	-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	4	11,11	-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	6	16,67	-
	Subtotal Kejadian		-	-	-
	Jumlah Kejadian		36	100,00	50.094.000,00

Terdapat 7 temuan dan 11 rekomendasi pada hasil audit kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sedangkan hasil audit kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terdapat 20 temuan dengan 20 rekomendasi serta hasil audit kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi terdapat 9 temuan dengan 14 rekomendasi.



Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 3.

Tabel 3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja
Tahun Anggaran 2024

NO	SUB KELOMPOK REKOMENDASI	JUMLAH KEJADIAN	%	NILAI TEMUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	2	4,44	2.760.000,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	-	-	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	22	48,89	47.334.000,00
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	-	-	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	4	8,89	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	9	20,00	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	1	2,22	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	-	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	1	2,22	-
14	Lain-lain	6	13,33	-
	Jumlah	45	100,00	50.094.000,00

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, audit kepatuhan dan audit investigasi.



Dalam hal pemeriksaan investigasi, apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau tindakan yang membawa dampak pada kerugian negara, Inspektorat Daerah Kota Bekasi segera melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan ADTT ini dapat dilakukan atas perintah kepala daerah karena adanya hal-hal khusus. Hal ini berbeda dengan Audit Kinerja yang mempunyai jadwal pasti yang direncanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di awal tahun.

Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:



Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Tahun 2024

NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigatif						
	1. Laporan Hasil Audit Investigasi Kegiatan Penyediaan Konsultasi Hukum dan Pendampingan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2023	1	404.000.000	1	384.000.000	-	-
	2. Laporan Audit Investigasi Kegiatan Pengadaan Alat-alat Olahraga Tahun 2023 di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dengan Sumber Dana APBD Murni dan APBD Perubahan	1	10.000.000.000	1	9.931.505.000	-	-
	3. Laporan Hasil Audit Investigasi Pekerjaan Pemeliharaan Halte pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bekasi TA 2023	1	2.200.000.000	1	1.948.412.857	-	-
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan						
	1. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Bekasi	6	183.882.336.767	6	105.840.489.290	-	-
	2. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu Bantuan Hibah KONI Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	-	-	-	-	1	49.163.951.948



NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Laporan Hasil Audit Atas Anggaran Honorarium Kegiatan yang Bersumber Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	-	-	-	-	1	12.146.200.000
	4. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diserahkan kepada Individu pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	-	-
C	Audit Kepatuhan Atas Pelayanan Publik						
	1. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Se-Kelurahan pada Kecamatan Bekasi Barat Tahun Anggaran 2023	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	-	-
	2. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	-	-
	3. Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	1	800.000.000	1	800.000.000	-	-



NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
D	Probity Audit						
	1. Laporan Hasil Probity Audit Pembangunan Taman Se-Kota Bekasi (Pembangunan Taman Plaza Patriot Candrabhaga) pada DBMSDA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	7.770.150.000	1	-	-	-
	2. Laporan Hasil Probity Audit atas Pekerjaan Building Management Gedung Teknis Bersama Tahun 2024 untuk Tahap Pelaksanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	-	1	-	-	-
	3. Laporan Hasil Probity Audit Belanja Modal Pembangunan GOR Terpadu Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	1	59.477.486.000	1	57.711.088.000	-	-
	4. Laporan Hasil Probity Audit Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bekasi Kelas I Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	1	19.525.870.000	1	19.097.953.000	-	-
	5. Laporan Hasil Probity Audit Pembangunan Polder Vila Indah Permai 2 Tahun Anggaran 2024 pada DBMSDA Kota Bekasi	1	14.901.250.000	1	13.989.208.000	-	-
	6. Probity Audit (Perencanaan) pada Dishub Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	-	-	-	-	-



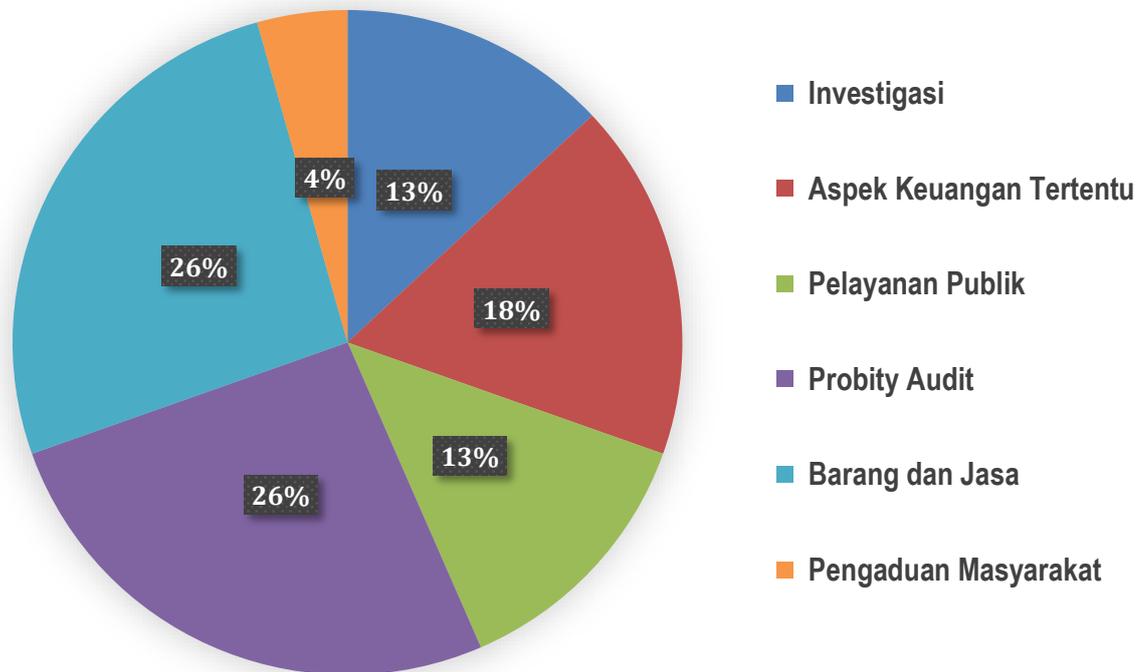
NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
E	Audit Kepatuhan Bidang Pengadaan Barang Jasa						
	1. Laporan Hasil E-Audit Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Building Management Tahun Anggaran 2023 pada RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi	1	25.000.000.000	1	24.999.991.482	-	-
	2. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Realisasi Anggaran Belanja Honorarium pada Bakesbangpol Tahun Anggaran 2024	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	-	-
	3. Laporan Hasil Audit Kepatuhan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 pada Satpol PP Kota Bekasi	1	9.732.800.000	1	4.639.770.857	-	-
	4. Laporan Hasil Audit Ketaatan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bankeu DKI) pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024	1	769.200.000	1	248.550.000	-	-
	5. Laporan Hasil Audit Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi	1	65.857.786.844	1	36.471.034.086	-	-
	6. Laporan Hasil Audit Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi	1	7.760.160.300	1	2.775.970.148	-	-
F	Audit Tujuan Tertentu Tindak Lanjut Pengaduan						
	1. Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Printer dan TV pada Dinas Pendidikan	-	-	-	-	1	213.296.225



NO	KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	PKPT				NON- PKPT	
		TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)	JUMLAH OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kota Bekasi yang menggunakan Dana BOS Pusat SMPN Se-Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021						
	2. Laporan Hasil Audit Investigasi Kegiatan Penyediaan Konsultasi Hukum dan Pendampingan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2023	1	404.000.000	1	384.000.000	-	-
	3. Laporan Hasil E-Audit Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Building Management Tahun Anggaran 2023 pada RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi	1	25.000.000.000	1	24.999.991.482	-	-
	4. Laporan Hasil Audit Investigasi Pekerjaan Pemeliharaan Halte pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bekasi TA 2023	1	2.200.000.000	1	1.948.412.857	-	-
	5. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu pada Kegiatan Pengadaan Baktor Sumber Dana Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	-	-	-	-	1	5.705.700.000



Diagram 2
Audit Tujuan Tertentu



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.184-ITKO/IV/2020 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, Audit Dengan Tujuan Tertentu Belanja Sosial Uang yang Diserahkan kepada Individu pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Aspek Keuangan Tertentu, masih terdapat kelemahan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta terdapat kelebihan atas pembayaran paket pekerjaan.

Pelaksanaan *Probitiy Audit* dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. *Probitiy Audit* yang telah dilaksanakan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan Gedung, Building Management, Pembangunan GOR serta Pembangunan Polder. Dari hasil *probitiy audit*, masih didapatkan selisih kurang antara dokumen pengadaan barang dan realisasinya, serta masih terdapat



kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa yang belum dipenuhi pada kegiatan pembangunan gedung.

Dari hasil pemeriksaan uji kualitas dan kuantitas infrastruktur ditemukan kelemahan-kelemahan yang secara umum disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah belum dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan berlaku;
- b. Meningkatkan pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas pokok tim pengawas internal pengawasan pekerjaan;
- c. Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi/mutu material sesuai kontrak.

Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif Tahun 2024

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Objek Audit Investigatif	3
Jumlah Audit Investigatif Berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	3
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	100%

Audit Investigasi yang dilakukan merupakan hasil dari laporan telaah awal pengaduan masyarakat, permintaan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil dari telaah awal pengaduan masyarakat menyatakan bahwa terdapat bukti audit yang cukup terhadap dugaan sebagaimana pengaduan, Hasil dari audit investigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kerja sama yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik aturan terkait penanganan perkara hukum, kerja sama daerah (yang juga dicantumkan sebagai konsiderans MoU) maupun aturan terkait kerja sama BLUD. Selain itu, ditemukan kondisi tata kelola yang tidak transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara/daerah;
- b. Pengadaan alat olahraga (APBD TA 2023) tidak didukung dengan surat keputusan penerima manfaat, penyedia yang dipilih dalam e-katalog terindikasi proforma, dan pengiriman peralatan olahraga terindikasi terlambat diterima;
- c. Pada Pekerjaan Pemeliharaan Halte (32 halte) terdapat kelemahan dalam proses pemilihan penyedia maupun dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Halte



(10 halte) ditemukan kelemahan pada tahap perencanaan pekerjaan (perencanaan kebutuhan, perencanaan teknis, perencanaan penganggaran dan pemilihan penyedia), dan kelemahan pada tahap pelaksanaan pekerjaan berupa aktivitas pembongkaran (pemusnahan) aset berupa halte yang tidak sesuai ketentuan, serta kelemahan dalam pengawasan pekerjaan.

Hasil audit investigasi berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke instansi penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Audit Investigasi Yang Dilimpahkan Ke Instansi Penyidik
Tahun 2024

INSTANSI PENYIDIK	KASUS	(%)	POTENSI KERUGIAN NEGARA*)	
			RUPIAH	VALAS**)
1	2	3	4	5
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
Tahun 2024

STATUS	KASUS	(%)	POTENSI KERUGIAN NEGARA*)		KETERANGAN
			RUPIAH	VALAS	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan Ke Pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Auditor internal dalam pekerjaannya dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting



dalam menjaga kredibilitas profesi auditor internal dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerjaan pemeriksa berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama untuk berbuat curang (kolusi). Berikut ini adalah aturan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan tugas selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 8

Kode Etik Dan Standar Audit Yang Digunakan

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;2. Peraturan Deputi BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Audit Ketaatan;3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi;4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bekasi;5. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.47-ITKO/VIII/2022 tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi;6. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.52-ITKO/IX/2022 tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XII Tentang BUMD pasal 343 ayat 1 Pengelolaan BUMD harus memenuhi paling sedikit tata kelola perusahaan yang baik;4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 yang sudah diubah dengan 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;10. Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2014 tentang tentang Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;12. Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;14. Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum;15. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;16. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2022;19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD;24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	<p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;</p> <p>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah;</p> <p>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;</p> <p>31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara kerjasama dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga;</p> <p>33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>34. Permenkeu RI Nomor 2/PMK.07 /2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah/Propinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 2022;</p> <p>35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD;</p>



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	<p>38. Surat Edaran Mendagri Nomor 700/1329/IJ Tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah;</p> <p>39. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;</p> <p>40. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ;</p> <p>41. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>42. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>43. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah;</p> <p>44. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Barang Jasa Pemerintah;</p> <p>45. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>46. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah</p> <p>48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;</p> <p>49. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023;</p>



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	<p>50. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>51. Peraturan Daerah 5 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan penyerahan TPU;</p> <p>52. Peraturan Daerah 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan PSU Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;</p> <p>53. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;</p> <p>54. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi 2015-2035;</p> <p>55. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2031;</p> <p>56. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);</p> <p>57. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 87 Seri E);</p> <p>58. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88 Seri E);</p> <p>59. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;</p> <p>60. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 Seri E);</p> <p>61. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan</p>



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	<p>Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>62. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah;</p> <p>63. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>64. Peraturan Wali Kota Bekasi 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan penyerahan TPU;</p> <p>65. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;</p> <p>66. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;</p> <p>67. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);</p> <p>68. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 39 Seri E);</p> <p>69. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E);</p> <p>70. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);</p> <p>71. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);</p> <p>72. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 79 Seri E);</p>



KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT	DASAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	<p>73. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 77 Seri E);</p> <p>74. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 76 Seri E);</p> <p>75. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 75 Seri E);</p> <p>76. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);</p> <p>77. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;</p> <p>78. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.</p> <p>79. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.73-Bapenda/II/2021 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Serta Pendapatan Daerah Lainnya oleh Perangkat Daerah di Kota Bekasi;</p> <p>80. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.278-BAPENDA/V/2021 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.73-Bapenda/II/2021 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Serta Pendapatan Daerah Lainnya oleh Perangkat Daerah di Kota Bekasi;</p> <p>81. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 862/Kep.10/BKPSDM/II/2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>



B. REVIU

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Reviu atas Laporan Keuangan

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.

Tabel 9
Jumlah Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Tahun 2024

KETERANGAN	JUMLAH
1	2
Jumlah Objek Yang Seharusnya Direviu	1
Jumlah Objek Yang Direviu	1
Objek yang Mendapat Pernyataan Tanpa Paragraf Penjelas	-
Objek yang Mendapat Pernyataan Dengan Paragraf Penjelas	-

Hasil audit Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan beberapa catatan yang harus mendapat perhatian pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

2. Reviu Penyerapan Anggaran

Reviu Penyerapan Anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan peran APIP dalam peran pengawalan dan pemberi solusi bagi permasalahan penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ serta menyajikan informasi yang lebih handal dan komprehensif kepada Wali Kota dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKP.



Tabel 10

Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Objek Yang Seharusnya Direviu	44
Jumlah Objek Yang Direviu	44
Objek yang Mendapat Pernyataan Tanpa Paragraf Penjelas	-
Objek yang Mendapat Pernyataan Dengan Paragraf Penjelas	-

Reviu Penyerapan Anggaran dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bekasi. Hasil Reviu Penyerapan Anggaran Tahun 2024 secara umum dapat digambarkan bahwa untuk setiap Triwulan terdapat perangkat daerah yang pencapaian target penyerapan anggarannya masih rendah. Hal ini berpengaruh kepada tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil reviu Triwulan III tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bekasi mencapai 50,75% dan diakhir Tahun Anggaran 2024 penyerapan anggaran mencapai Rp5.739.450.329.436,33 atau 76,70% dari APBD Perubahan sebesar Rp7.482.612.841.070,00.

3. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk Menjamin Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Reviu terhadap dokumen perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Reviu Dokumen Perencanaan Tahun 2024

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan	Inspektorat Daerah Kota Bekasi merekomendasikan Pj. Wali Kota Bekasi untuk menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi : a. Menyempurnakan serta menyelaraskan Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi Tahun 2025



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
		Daerah Kota Bekasi	<p>dengan Perwal RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mencantumkan Target Kinerja Sasaran Dan Program Dalam Rancangan Akhir RKPD;2) Mencantumkan pagu anggaran pada program prioritas Pembangunan dengan mempertimbangkan pencapaian target program tersebut demi tercapainya prioritas Pembangunan yang diharapkan;3) Mencantumkan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025;4) Melakukan penyesuaian Indikator Dan Target Kinerja Daerah Antara rancangan akhir RKPD Dengan RPD; <p>b. Menguraikan secara rinci terkait perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Melakukan penyesuaian nomenklatur yang berbeda antara RKPD dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 20221 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Agar mengevaluasi Kembali pencantuman prioritas pembangunan baru yang sebelumnya tidak terdapat pada Peraturan Wali Kota RPD dengan mempertimbangkan prioritas yang akan dicapai pada tahun 2025. Selain itu apabila terdapat prioritas Pembangunan baru maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026;</p> <p>e. Agar mengevaluasi dan mengkomodir pelaksanaan SPM yang didukung dengan</p>



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			<p>program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang memadai, selain itu juga menganalisa kembali target pada indikator baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah pengampu urusan SPM untuk memastikan tercapainya target SPM 100% seperti yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 serta melengkapi indikator dan target pada program dan kegiatan yang belum memiliki indikator dan target kinerja pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025;</p>
			<p>f. Memperhatikan pengalokasian anggaran untuk Belanja Pegawai dengan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja paling lama dua tahun dari penetapan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>g. Menyempurnakan dan menyelaraskan antar Bab pada Rancangan Akhir RKPD terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyelarasan terkait Pagu Indikatif pada Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dengan Lampiran Bab V Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada Rancangan Akhir RKPD;2) Pencantuman Sumber dana yang sesuai dengan pengalokasiannya berdasarkan aturan yang berlaku.
			<p>h. Agar melakukan koordinasi dengan Seluruh Perangkat Daerah sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu anggaran yang terdapat pada rancangan akhir RKPD.</p> <p>i. Memperhatikan jadwal proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			j. Memperhatikan penganggaran terhadap mandatory spending terkait infrastruktur pelayanan publik, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi serta terkait Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
			k. Melakukan penginputan RKPD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Reviu terhadap Dokumen Penganggaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Reviu atas Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran. Adapun hasil reviu tersebut dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini :

Tabel 12
Reviu Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none">1 Tim Anggaran Pemerintah Daerah:<ol style="list-style-type: none">a. Memperhatikan jadwal proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tidak terjadi keterlambatan proses dari awal perencanaan hingga penganggaran;b. Memperhatikan penambahan pagu anggaran belanja yang signifikan, dan mempertimbangkan target realisasi anggaran tersebut agar dapat diserap tepat pada waktu mengingat telah memasuki triwulan III;c. Memperhatikan perencanaan alokasi belanja daerah agar kedepannya tidak terjadi perubahan anggaran yang signifikan pada akhir tahun anggaran berkenaan.2 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi agar:



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			<ol style="list-style-type: none">Penyajian program prioritas Pembangunan Tahun 2024 dan disesuaikan dengan Perwal Perubahan RKPD Tahun 2024;Mencantumkan Indikator Program, Kegiatan, Target, Lokasi, Kegiatan, Sumber Dana, dan Kelompok sasaran dan disesuaikan dengan Perwal Perubahan RKPD Tahun 2024;Menyelaraskan pagu anggaran baik program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja dengan Perwal Perubahan RKPD Tahun 2024;Mengevaluasi kembali penjumlahan terhadap perhitungan yang tersaji dalam dokumen PPAS;Menginput Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 melalui SIPD RI.

Selain Reviu atas Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah melaksanakan Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel 13 di bawah ini :

Tabel 13
Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan
Tahun Anggaran 2024

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Objek Yang Seharusnya Direviu	44
Jumlah Objek Yang Direviu	44
Objek yang Mendapat Pernyataan Tanpa Paragraf Penjelas	-
Objek yang Mendapat Pernyataan Dengan Paragraf Penjelas	-

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-P SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan yang mengalami perubahan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas



Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas kelengkapan dokumen Perubahan RKA-SKPD TA 2024, belum didukung dengan dokumen pendukung berupa Data Potensi Pendapatan, Kertas Kerja Perhitungan Proyeksi Pendapatan, TOR/KAK, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), SK Penetapan Penerima Hibah, Dokumen Perencanaan Pengadaan dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Atas kesesuaian dengan dokumen perencanaan, diketahui bahwa anggaran pendapatan dan anggaran belanja pada Perubahan RKA-SKPD TA 2024 yang dilakukan reviu telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perubahan KUA PPAS TA 2024 serta tidak terdapat penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada Perubahan RKA-SKPD diluar KUA PPAS;
- c. Atas kesesuaian Rincian Belanja dalam Perubahan RKA-SKPD TA 2024 dengan Standar Biaya dan Kaidah-Kaidah Penganggaran, belum sepenuhnya rincian belanja dapat dilakukan perbandingan kesesuaian dikarenakan keterbatasan informasi dari masing-masing belanja yang telah dicantumkan dalam Perubahan RKA-SKPD TA 2024;
- d. Atas kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran (output), anggaran yang telah disusun dapat mendukung pencapaian indikator kinerja keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Namun demikian perlu dipertimbangkan adanya penyesuaian dalam penetapan indikator kinerja yang lebih spesifik dalam menggambarkan seluruh aktivitas anggaran yang tercantum dalam Perubahan RKA-SKPD guna mendukung tercapainya target kinerja kegiatan dan program.

4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Peran APIP dalam penyusunan LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13



Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan reviu terhadap data dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan LPPD. Reviu LPPD merupakan bentuk penjaminan mutu (*quality assurance*) atau penyusunan LPPD yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi yang dituang dalam rancangan LPPD.

Hasil reviu LPPD dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD sebagaimana tertuang dalam tabel 14 berikut ini :

Tabel 14
Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu LPPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	Tim Penyusun LPPD Kota Bekasi Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none">1 Agar segera menyempurnakan dokumen LPPD Tahun 2023 sehingga dokumen LPPD Kota Bekasi Tahun 2023 dapat disajikan tepat waktu;2 Agar berkoordinasi dengan BPS Kota Bekasi terkait data capaian IKK Makro;3 Agar berkoordinasi dengan perangkat daerah penanggung jawab IKK yang tidak memiliki capaian dari tahun ke tahun, untuk diperoleh kesepakatan Bersama terkait pencapaian atas indikator kinerja kunci tersebut.4 Agar berkoordinasi dengan perangkat daerah pengampu urusan terkait tersedianya dokumen perencanaan bencana dan industri, sehingga dokumen tersebut dapat segera disusun dan dilegalkan serta dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan5 Agar berkoordinasi dengan perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait target, realisasi kinerja maupun anggaran dan memperbaiki sesuai catatan tim reviu;6 Agar berkoordinasi dengan perangkat daerah penanggung jawab IKK untuk segera merevisi dan/atau melengkapi data dukung yang valid/sah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Tim Reviu LPPD



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			7 Segera mengupload capaian dan bukti dukung IKK pada SILPPD Kemendagri agar Tim APIP dapat melakukan verifikasi dan validasi 8 Kepada Tim Penyusun LPPD agar segera menindaklanjuti permasalahan yang menjadi catatan hasil reviu, baik dalam simpulan maupun dalam uraian hasil reviu.

5. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

Penyusunan Laporan Kinerja yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP tersebut diwujudkan dengan nilai yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja.

Berikut dalam tabel 15 digambarkan hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Tabel 15
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
1	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Kota Bekasi (Sekretariat Daerah)	1 Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi Agar: a. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang menyusun SOP tentang Penyusunan LKIP Perangkat Daerah; b. Melakukan desk atas draft LKIP Perangkat Daerah sebelum direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.



NO	JUDUL REVIU	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI/URAIAN HASIL REVIU
			<p>2 Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi agar menetapkan SK Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Penyusun LKIP beserta uraian tugasnya;</p> <p>3 Kepala Perangkat Daerah agar memperbaiki Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>4 Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi bersama Tim Penyusun LKIP Tahun 2023 agar menyelaraskan tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya;</p> <p>5 Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi segera memperbaiki LKIP Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan mengupload ke dalam esr.menpan.go.id.</p>

6. Reviu atas Aspek Keuangan Tertentu

Reviu atas Aspek Keuangan Tertentu adalah reviu atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Reviu atas Aspek Keuangan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah :

- a. Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 3 TA 2023 Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- b. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana Tahap 3 TA 2023 pada DPPPA Kota Bekasi.
- c. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 DAK FISIK 2023.



- d. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap I TA 2024.
- e. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Paud Tahap 1 TA 2024.
- f. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 1 TA 2024.
- g. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap 1 TA 2024.
- h. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi Tahap I TA 2024.
- i. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap I TA 2024.
- j. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi Tahap 2 TA 2024.
- k. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Paud Tahap 2 TA 2024.
- l. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 2 TA 2024.
- m. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap 2 TA 2024.
- n. Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap 2 TA 2024.
- o. Reviu Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi TA 2024.

7. Reviu Lainnya

Reviu lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah Reviu Analisa Standar Biaya (ASB), Reviu Standar Satuan Harga (SSH) dan Reviu Manajemen ASN. Reviu tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.184-ITKO/IV/2020 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020.



C. EVALUASI

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah dilaksanakan terhadap 44 perangkat daerah. Komponen SAKIP yang dinilai meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Laporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja (25%), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 16
Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1	Dinas Pendidikan	60.05	B
2	Dinas Kesehatan	80.67	A
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmajid	84.58	A
4	Dinas Tata Ruang	78.92	BB
5	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	79.94	BB
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	69.25	B
7	Satuan Polisi Pamong Praja	64.26	B
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	78.33	BB
9	Dinas Sosial	77.29	BB
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.10	B
11	Dinas Tenaga Kerja	61.63	B
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	80.35	A
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	79.48	BB
14	Dinas Lingkungan Hidup	78.56	BB
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.59	A
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	74.53	BB
17	Dinas Perhubungan	80.03	A
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	80.67	A
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	78.19	BB
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.97	A
21	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	74.51	BB
22	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	68.89	B
23	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	70.03	BB
24	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	80.03	A
25	Sekretariat Daerah	82.04	A
26	Sekretariat DPRD	69.62	B
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	85.02	A
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	81.43	A
29	Badan Pendapatan Daerah	78.07	BB
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.02	A
31	Inspektorat Kota	84.57	A
32	Kecamatan Bekasi Timur	76.55	BB
33	Kecamatan Bekasi Barat	62.81	B
34	Kecamatan Bekasi Utara	72.74	BB
35	Kecamatan Bekasi Selatan	75.16	BB



36	Kecamatan Medansatria	78.90	BB
37	Kecamatan Rawalumbu	77.90	BB
38	Kecamatan Bantargebang	74.78	BB
39	Kecamatan Mustikajaya	74.85	BB
40	Kecamatan Jatiasih	60.23	B
41	Kecamatan Pondokgede	77.14	BB
42	Kecamatan Jatisampurna	75.57	BB
43	Kecamatan Pondokmelati	75.14	BB
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	76.72	BB

Permasalahan yang masih dijumpai dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pemahaman yang keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LKIP, yaitu evaluasi dipahami terbatas pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi SAKIP secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyusunan LAKIP antara lain masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, Indikator Kinerja Utama (IKU) belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20M.PAN/11/2008. Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja, penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mechanisme pengumpulan data kinerja, dan laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mechanisme pengumpulan data kinerja, dan laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.

D. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi antara lain:

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kota Bekasi (APIP).
2. Pemantauan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bekasi Tahun 2024.
3. Pemantauan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 Tahap Pengangkatan pada Pemerintah Kota Bekasi.
4. Monitoring Musrenbang di 12 Kecamatan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024.



5. Monitoring LHKPN/LHKASN.
6. Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2024.
7. Monitoring paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi, Konsultasi, Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Kapabilitas APIP berupa pendidikan dan pelatihan serta diklat sertifikasi sebagaimana diurai pada tabel 17 di bawah ini :

Tabel 17
Realisasi Kegiatan Pengawasan Lainnya pada Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	BELANJA (Rp)		KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
1	Sosialisasi					
	1.1 Sosialisasi Saluran Pengaduan Masyarakat	-	-	-	2	Perangkat Daerah
	1.2 Sosialisasi Anti korupsi Kepada Stakeholder Internal Pemerintah Daerah dan Eksternal/Ekspert Pemerintah Daerah Tahun 2024	-	-	1	1	Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, Ekspert
	1.3 Sosialisasi Gratifikasi pada Perangkat Daerah Kota Bekasi	-	-	44	44	Perangkat Daerah
2	Pemberian Konsultasi					
	2.1 Pemberian Konsultasi Lisan Bidang Investigasi	-	-	Tentatif	7	Perangkat Daerah
	2.2 Pemberian Konsultasi Tertulis Bidang Investigasi	-	-	Tentatif	5	Perangkat Daerah
	2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	Tentatif	12	Perangkat Daerah
3	Pendampingan					
	3.1 Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Rsud Kelas D Pondokgede Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2024	-	-	Tentatif	1	Perangkat Daerah



NO	KEGIATAN PENGAWASAN	BELANJA (Rp)		KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
	3.2 Pendampingan Dalam Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai BLUD UPTD PALD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi TA 2024	-	-	Tentatif	1	Perangkat Daerah
	3.3 Pendampingan Pengadaan Ambulance Jenazah Secara E-Catalog Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2024	-	-	Tentatif	1	Perangkat Daerah
	3.4 Pendampingan Pengadaan Meubelair Secara E-Catalog Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2024	-	-	Tentatif	1	Perangkat Daerah
4	Kapabilitas APIP					
	4.1 Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)	30.000.000	25.000.000	2	2	Orang
	4.2 Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	30.000.000	25.000.000	2	2	Orang
	4.3 Sertifikasi Bagi PPUPD	-	-	3	2	Orang
	4.4 Diklat Audit Kinerja	10.800.000	10.800.000	21	21	Orang
	4.5 Bimtek Penyusunan Dokumen Manajemen risiko SPBE	4.720.000	4.720.000	44	44	Orang
	4.6 Bimtek Penyusunan dan Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.200.000	4.200.000	70	70	Orang
	4.7 Workshop Pemeriksaan Infrastruktur Jalan (Uji Kualitas dan Kuantitas)	204.000.000	180.000.000	20	20	Orang



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	BELANJA (Rp)		KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
4.8	Workshop Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	165.000.000	165.000.000	30	30	Orang
4.9	Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	110.000.000	110.000.000	20	20	Orang
4.10	Workshop Evaluasi Pendapatan	165.000.000	165.000.000	30	30	Orang
4.11	Workshop Pengawasan Barang Milik Daerah	150.000.000	150.000.000	20	20	Orang
4.12	Workshop Evaluasi Pengawasan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	110.000.000	110.000.000	20	20	Orang
4.13	Bimtek Reviu Laporan Keuangan	18.000.000	12.600.000	28	28	Orang
4.14	Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	18.000.000	10.800.000	30	30	Orang
4.15	Bimtek Perencanaan dan Penganggaran	27.000.000	13.500.000	24	24	Orang
4.16	Workshop Pengawasan Terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	4.500.000	27	27	Orang
4.17	Bimtek Audit Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	5.400.000	5.400.000	25	25	Orang
4.18	Diklat Bagi Auditor Pertama	110.000.000	110.000.000	20	20	Orang
4.19	Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000	165.000.000	30	30	Orang
4.20	Diklat Kesekretariatan	82.200.000	64.800.000	36	36	Orang



Sosialisasi difokuskan pada pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi dan sapu bersih pungutan liar. Sedangkan untuk konsultasi tertulis maupun lisan serta pendampingan/asistensi pada perangkat daerah dilakukan untuk memberikan atensi, saran dan pendapatan serta *problem solving* atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing.

Untuk Peningkatan Kapabilitas APIP, ada 20 kegiatan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, baik diklat fungsional maupun diklat substantif/tematis sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas. Hal itu perlu dilakukan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah. Tingkat Kematangan SPIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 telah mencapai Nilai Maturitas SPIP Level 3 yang memiliki arti bahwa praktik pengendalian telah dilakukan, namun evaluasi belum terdokumentasi dengan baik. Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Kinerja ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dengan hasil sebagaimana tergambar dalam diagram dan tabel dibawah ini:



Capaian persentase di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Kondisi *eksisting* Semester I tahun 2024 berdasarkan Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI terdapat 494 temuan dengan 1.303 rekomendasi, selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.127 rekomendasi dan kerugian negara sebesar Rp97.498.913.257,19. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal mencapai 86,50% pada Semester I tahun 2024.

Penyelesaian rekomendasi sampai dengan Semester II Tahun 2024 adalah 87,34% (selesai 1.138 dari 1.303) rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah kerugian negara yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp97.599.530.341,01.



Tabel 18
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Semester II Tahun 2024

TAHUN	JML LHP	TEMUAN		REKOMENDASI		PERKEMBANGAN STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT							
						SESUAI DENGAN REKOMENDASI		BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT		BELUM DITINDAK LANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH	
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
2024	1	20	22.445.180.094,59	91	15.729.262.463,03	55	3.942.319.958,00	36	11.786.942.505,03	0	0,00	0	0,00
2023	1	11	21.148.193.292,64	48	21.031.318.292,64	31	3.118.684.436,32	17	17.912.633.856,32	0	0,00	0	0,00
2022	2	26	21.171.870.650,31	100	19.620.734.587,65	82	6.180.401.243,38	18	13.440.333.344,27	0	0,00	0	0,00
2021	1	12	1.506.182.166,66	31	1.506.182.166,66	28	1.495.227.677,00	3	10.954.489,66	0	0,00	0	0,00
2020	2	18	5.399.482.096,53	63	5.399.482.096,53	61	5.399.482.096,53	2	0,00	0	0,00	0	0,00
2019	2	23	7.438.187.864,25	92	7.438.187.864,25	86	6.414.909.605,75	6	1.023.278.258,50	0	0,00	0	0,00
2018	2	24	17.523.099.025,76	78	15.417.906.765,16	72	12.361.855.208,29	6	3.056.051.556,87	0	0,00	0	0,00
2017	2	25	3.071.535.969,29	88	3.003.724.569,29	75	1.217.838.517,29	13	1.785.886.052,00	0	0,00	0	0,00
2016	2	28	5.716.395.226,25	93	2.795.646.463,45	87	2.218.593.416,45	6	577.053.047,00	0	0,00	0	0,00
2015	2	30	21.746.892.566,47	82	21.745.540.831,47	79	21.142.352.147,47	3	603.188.684,00	0	0,00	0	0,00



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

TAHUN	JML LHP	TEMUAN		REKOMENDASI		PERKEMBANGAN STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT							
						SESUAI DENGAN REKOMENDASI		BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT		BELUM DITINDAK LANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH	
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
2014	3	39	10.544.313.229,00	115	9.639.866.442,00	97	6.617.867.515,36	18	3.021.998.926,64	0	0,00	0	0,00
2013	1	18	1.212.952.433,94	39	1.212.952.433,94	38	1.212.952.433,94	1	0,00	0	0,00	0	0,00
2012	1	24	2.096.378.683,93	64	565.585.832,93	61	539.700.832,93	3	25.885.000,00	0	0,00	0	0,00
2011	3	38	3.901.615.112,34	81	3.291.915.923,84	69	2.293.343.843,34	5	998.572.080,50	0	0,00	7	0,00
2010	1	20	6.844.044.737,00	34	6.317.544.737,00	29	5.307.385.729,00	2	1.010.159.008,00	0	0,00	3	0,00
2009	3	46	356.018.570,92	70	356.018.570,93	70	356.018.570,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2008	2	23	29.057.447.889,98	42	1.491.490.758,35	38	1.314.067.780,55	3	154.784.705,80	0	0,00	1	22.638.272,00
2007	3	25	9.955.608.750,02	40	8.644.107.575,38	39	8.644.107.575,38	1	0,00	0	0,00	0	0,00
2006	2	14	14.836.586.965,26	19	14.836.586.965,26	16	3.333.148.123,57	3	11.503.438.841,69	0	0,00	0	0,00
2005	2	30	9.031.938.545,53	33	7.668.682.472,53	25	4.489.273.629,53	8	3.179.408.843,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	37	494	215.003.923.870,67	1.303	167.712.737.812,29	1.138	97.599.530.341,01	154	73.602.182.998,10	0	0,00	11	22.638.272,00



B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Jumlah rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 s.d Tahun 2022 berjumlah 253 rekomendasi yang terdiri atas Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Manajemen Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Wali Kota Bekasi.

Dari 253 rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 248 rekomendasi atau 98,02% dan dalam proses penyelesaian sebanyak 5 rekomendasi atau 1,98%.

Tabel 19
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
				S	DP	B
1	2011	11	11	11	-	-
2	2012	16	24	24	-	-
3	2013	7	21	21	-	-
4	2014	14	19	19	-	-
5	2015	16	84	84	-	-
6	2016	10	13	13	-	-
7	2017	12	20	18	2	-
8	2018	11	18	17	1	-
9	2019	13	13	13	-	-
10	2020	-	-	-	-	-
11	2021	13	13	12	1	-
12	2022	9	17	16	1	-
	Jumlah	132	253	248	5	-



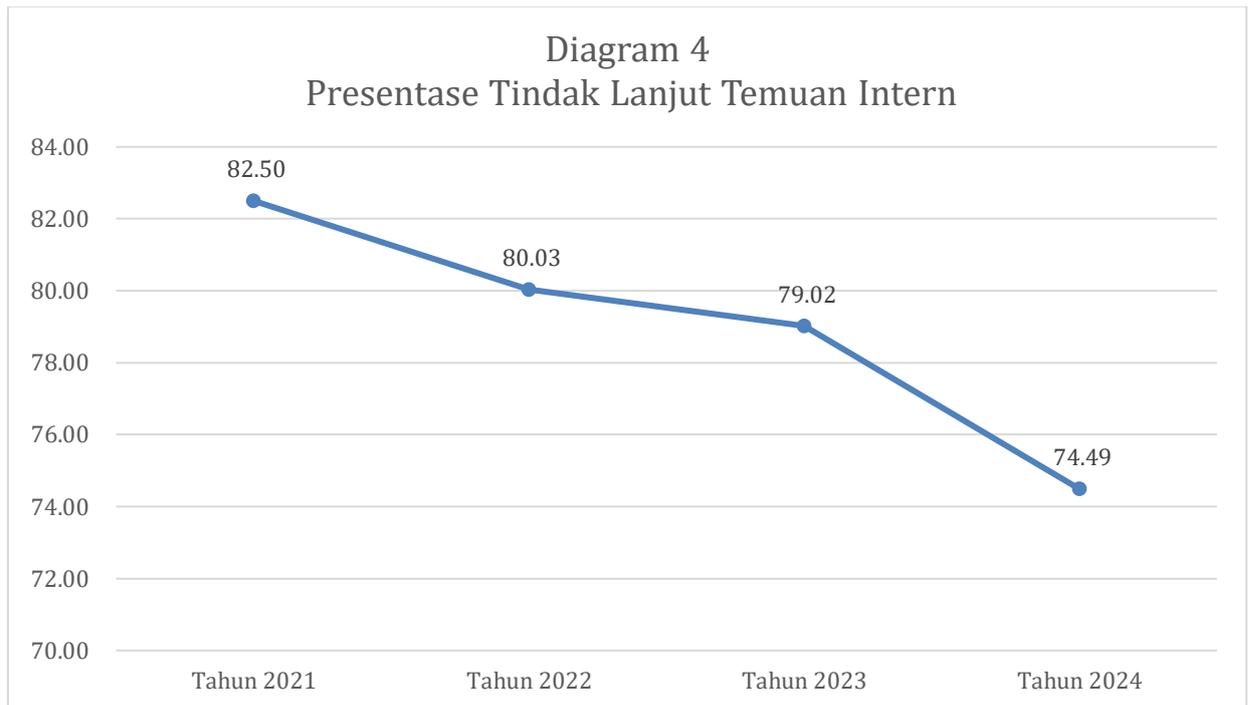
Tabel 20
Rekapitulasi Kerugian Daerah Kota Bekasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	NILAI KERUGIAN (Rp)	DISETOR	SISA (Rp)
1	2013	70.902.351,13	70.902.351,13	-
2	2014	23.479.184,00	23.479.184,00	-
3	2015	57.923.113,02	57.923.113,02	-
4	2016	116.548.549,07	116.548.549,07	-
5	2017	617.201.617,89	512.128.458.,78	105.073.159,11
6	2018	514.735.545	160.969.995,00	353.765.550,00
7	2019	-	-	-
8	2020	-	-	-
9	2021	-	-	-
10	2022	496.761.918,00	496.761.918,00	-
	JUMLAH	1.897.552.372,11	1.438.713.663,00	458.838.709,11

C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Bekasi

Jumlah temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan masa kurun waktu pengawasan dari tahun 2016 s.d tahun 2024 adalah berjumlah 2.264 temuan dengan rekomendasi sebanyak 3.575 rekomendasi. Dari 3.575 Rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.663 rekomendasi atau 74,49% dan dalam proses penyelesaian sebanyak 375 rekomendasi atau 10,49% dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 537 atau 15,02%.

Perkembangan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan intern dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini :





Tabel 21
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Bekasi Tahun 2024

TAHUN	TEMUAN	REKOMENDASI	PERKEMBANGAN STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT			
			SESUAI DENGAN REKOMENDASI	BELUM SESUAI DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUTI	TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH
	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
2024	373	560	154	90	316	0
2023	288	444	338	72	34	0
2022	113	212	153	43	16	0
2021	135	268	190	63	15	0
2020	181	302	266	28	8	0
2019	32	109	106	0	3	0
2018	172	246	228	15	3	0
2017	560	646	631	12	3	0
2016	410	788	597	52	139	0
Total	2.264	3.575	2.663	375	537	0



BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan dan dilakukan tindak lanjut penanganannya. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor dengan memperhatikan kerahasiaan dan tingkat profesionalisme pihak yang terlibat. Setiap pelapor berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan ataupun tekanan namun tetap memperhatikan norma dan prosedur penyampaian pengaduan yang benar.

Berdasarkan data dan informasi terkait dengan pengaduan masyarakat kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berikut tersaji rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024.



Tabel 22
Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
1	06/KIP/204/BANASPATI /DPC//2024 Tanggal 10 Januari 2024	a. Banaspati b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	Permohonan Keterbukaan Informasi Publik, berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan terkait pengadaan alat-alat olahraga senilai Rp.5.000.000.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi TA APBD 2023.	√							
2	004/DPP-LP2KP/ Konf./I/2024 Tanggal 11 Januari 2024	a. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantauan Pembangunan	Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian		√						Selesai



No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
		dan Kinerja Pemerintah b. DBMSDA Kota Bekasi	negara dengan dugaan tindak pidana korupsi kelebihan bayar atas 11 paket pekerjaan di DBMSDA Senilai Rp.3.482.020.056,01 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2019								
3	005/DPP- LP2KP/Konf./I/2024 Tanggal 17 Januari 2024	a.Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantauan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah b.Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Konfirmasi Dugaan adanya konspirasi praktek KKN dalam pemenangan tender yang mengarah kepada tindak pidana korupsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi		√						Selesai



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
4	05 Februari 2024	a. Rifki Firdaus (Media Kompas) b. Kecamatan Bekasi Barat	Tentang adanya pungli yang dilakukan pihak Kecamatan Bekasi Barat yang notabnya ada pedagang yang berada di depan dan halaman Kantor Kecamatan Bekasi Barat yang diizinkan berdagang dan mereka setoran ke pihak Kecamatan		√						Selesai
5	23 Februari 2024	a. Sukri Akib (Pak Yoli) b. Satpol PP Kota Bekasi	Pengaduan warga RW 018 Harapan Baru I soal pengaduan pelanggaran fungsi rumah tinggal ke usaha milik Siswanto Eks Ketua RW 018		√						Selesai



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
			dan dikesankan adanya pembiaran dari aparat								
6	55/K-Inf/BIRO/SK- PJ/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024	a. Surat Kabar Progresif Jaya b. Pemerintah Kota Bekasi	Penerima hibah uang dan bantuan sosial 2023 meminta Konfirmasi		√						Selesai
7	068/EX-P/DPC/LSM TRINUSA/VII/2024 Tanggal 03 Agustus 2024	a. LSM Triga Nusantara (LSM Tri Nusa) b. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi	Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pdt/2022	√							Diserahkan ke Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi
8	30 Agustus 2024	a. Bapak Sukri Akib (Yoli) b. Pemda Kota Bekasi	Pengaduan Warga yang tidak pernah direspon penyelesaiannya oleh aparat Pemda kota Bekasi		√						Selesai



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
9	B-11/D- 2/Dumas/DM.03/.3/2024 Tanggal 12 Maret 2024	a. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia b. SDN Teluk Pucung 1 Kota Bekasi	Pengaduan Saudara Septirahayu Restu Wulandari yang melaporkan dugaan pungutan liar di SDN Teluk Pucung 1 Kota Bekasi sebagaimana surat terlampir	√							Dilimpahkan ke Dinas Pendidikan
10	B-02/D- 2/Dumas/DM.00/.3/2024 Tanggal 04 Maret 2024	a. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia b. DPKPP Kota Bekasi	Permohonan bantuan dana pembangunan fasilitas di Perumahan Mutiara Gading Timur 2 Bekasi sebagaimana terlampir		√						Selesai
11	T/614/LM.44- 34/0200.2024/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	a. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya b. Kecamatan Bekasi Barat dan Kelurahan	Permintaan Klarifikasi tertulis I terkait dugaan pungutan yang dilakukan oleh RW.15 dalam	√							Dilimpahkan ke Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
		Bintara Kota Bekasi	menyebarkan kwitansi donatur setiap bulannya guna biaya operasional RW.15								
12	001/Klarifikasi/DPP-LP2KP/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024	a. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantauan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah b. Bagian Barang dan Jasa Kota Bekasi	Permintaan Klarifikasi pemenang tender tidak mempunyai SBU sebagaimana terlampir	√							Dilimpahkan ke Bagian Barang dan Jasa
13	003/Klr/DPP/FORMASIP P/XI/2024 Tanggal 08 November 2024	a. Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Indonesia Peduli Pembangunan b. DPKPP Kota Bekasi	Dukungan Moral dan Tindakan Konkret atas dugaan perbuatan curang pembangunan pagar dan aula Kantor Kelurahan Kota Baru	√							Dilimpahkan ke DPKPP



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut		Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana		Lain- lain
					Benar	Tidak Benar					
14	6727/G6/RHS/ws.05.00/ 2024 Tanggal 21 Oktober 2024	a. Itjen Kemendikbud ristek b. Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Pengaduan Saudara Septirahayu Restu Wulandari Pengaduan Masyarakat tentang adanya iuran yang sifatnya ditentukan jumlahnya dan diharuskan oleh komite SDN Duren jaya V dan surat Nomor 6725/G6/RHS/ws.05. 00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Hal Pelimpahan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dana BOS di SDK	√							Dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan



No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
			Pa Van Der Steur Kota Bekasi								
15	001/Klarifikasi/DPP- LP2KP/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024	a. DPP Lembaga Pemantauan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi	Permintaan Klarifikasi pemenangan tender tidak mempunyai SBU		√						Selesai
16	07/PHN/DNK/XII/2023 Tanggal 1 Desember 2023	a. Kantor Advokat DNK & Partner	Permohonan Perlindungan Hukum atas Lahan Tanah yang terletak di Kel. Cikiwul		√						Selesai
17	1269/66/RHS/WS.05.00/ 2024 Tanggal 1 Februari 2024	a. Inspektur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan	Dugaan pungutan liar di SDN Jatimakmur V Kecamatan Pondok Gede dan SDN		√						Selesai



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
		Riset dan Teknologi b. Dinas Pendidikan	Jatirahayu V Kecamatan Pondok Melati								
18	Surat Pengaduan Masyarakat (Anonim) tanggal 27 Mei 2024	a. Anonim b. Dinas Pendidikan	Pungutan liar di SMPN 17 Kota Bekasi		√						Selesai
19	Pengaduan Masyarakat (Lisan) Ke Pj. Wali Kota Bekasi tanggal 27 Mei 2024	a. Anonim b. Dinas Pendidikan	Pungutan liar di TK Negeri 6 Kota Bekasi		√						Selesai
20	Pengaduan masyarakat melalui media sosial whatsapp oleh Sdr. Setia tanggal 20 September 2024	a. Sdr. Setia b. Dinas Perhubungan	Pungutan liar oleh oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi		√						Selesai
21	Pengaduan Masyarakat melalui Media Sosial Whatsapp tanggal 23 September 2024	a. Anonim b. Dinas Kesehatan	Dugaan mark up harga pada pengadaan barang/jasa di RSUD Tipe D Bantar Gebang Dinas		√						Selesai



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
			Kesehatan Kota Bekasi								
22	087/BDS-IKT/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024	a. Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Online Berita Dua Sisi b. Dinas Pendidikan	Kejanggalan Realisasi Dana BOS SMPN 16 Kota Bekasi TA 2024		√						Selesai
23	301/LI/DPP-VOSY RI/XI/2024 tanggal 6 November 2024	a. Ketua Umum LSM Vosy RI b. Dinas Pendidikan	Laporan/Informasi Dugaan Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan BOS SMPN		√						Selesai
24	Media Online www.injabar.com 12 November 2024	a. Media Online www.injabar.com b. Kel. Medansatria	Pungutan liar dalam proses Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kel. Medansatria	√							



Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

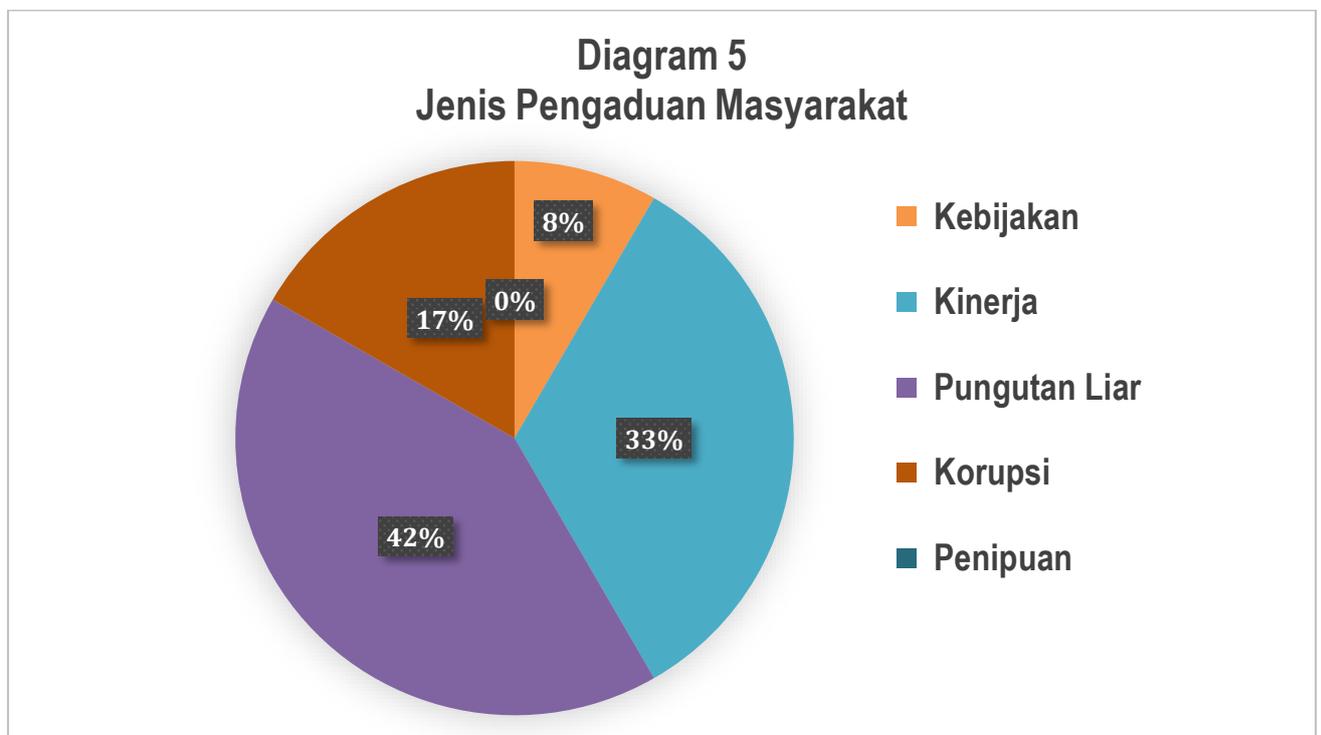
No	Nomor Tanggal Surat	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan
				Dalam Proses	Selesai		PP 94/2021	TP/TGR	Pidana	Lain- lain	
					Benar	Tidak Benar					
25	Surat Pemimpin Redaksi Zona Integritas Nomor 135/Tanggapan/ Integritas/ Red/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024	a. Pemimpin Redaksi Zona Integritas b. Dinas Pendidikan	Permintaan Tanggapan tentang Adanya Indikasi Permufakatan Jahat dalam Pembelanjaan e-Purchasing TA 2023 di Dinas Pendidikan Kota Bekasi		√						Selesai



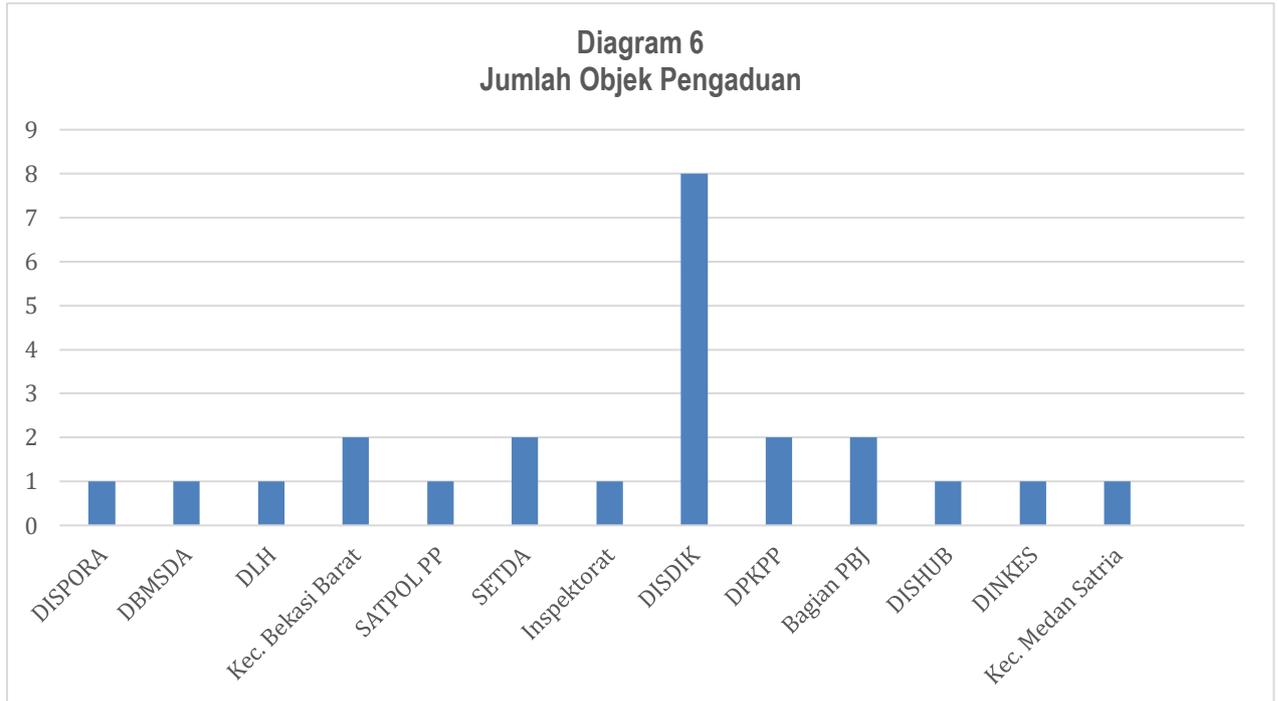
Dari hasil pengaduan sebagaimana tercantum diatas, terdapat beberapa pengaduan yang dilanjutkan melalui Audit Tujuan Tertentu (ATT) sebagaimana diurai dalam tabel 23 dibawah ini :

Tabel 23
Audit Tujuan Tertentu Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

AUDIT TUJUAN TERTENTU TINDAK LANJUT PENGADUAN	OBJEK PENGAWASAN
1 Audit Investigasi Kegiatan Penyediaan Konsultasi Hukum dan Pendampingan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi TA 2023	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
2 Audit Pekerjaan Pemeliharaan Halte Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bekasi TA 2023	Dinas Perhubungan Kota Bekasi



Dari diagram yang ditampilkan di atas, jumlah pengaduan masyarakat didominasi pada jenis pengaduan kinerja yang mencapai 33% sedangkan untuk jenis pengaduan yang paling sedikit adalah pada jenis kebijakan sebesar 8% dari total jumlah pengaduan.



Untuk objek pengaduan dari masyarakat lebih banyak ditujukan pada Dinas Pendidikan, Kecamatan Bekasi Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami laporkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kami simpulkan :

1. Dari hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan Masyarakat oleh APIP pada Inspektorat telah dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700.1/Kep.224-ITKO/IV/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dan Non PKPT;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya;
3. Audit yang telah dilaksanakan berupa Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu dan Audit Ketaatan yang berfokus pada Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa, selain itu telah dilaksanakan juga Probitas Audit pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan mandat aturan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku meliputi Reviu Laporan Keuangan, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu KUA PPAS Perubahan dan RKA Perubahan;
5. Kegiatan Evaluasi dalam rangka membandingkan hasil dengan standar rencana telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
6. Pemantauan telah dilaksanakan pada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal, Pemantauan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kelurahan;
7. Untuk pengawasan lainnya telah dilaksanakan Sosialisasi, Pemberian Konsultasi, Pendampingan dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

B. HAMBATAN

Beberapa hambatan dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang diharapkan, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan dan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;



2. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Inspektorat yang terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berupa pemeriksaan, evaluasi, reviu, asistensi, pendampingan dan tindak lanjut analisis evaluasi hasil pengawasan;
3. Dalam hal pemantauan tindak lanjut, perangkat daerah kurang optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan baik dari pengawas Internal maupun eksternal.

C. REKOMENDASI

1. Mengajukan usulan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengawasan serta pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pada instansi pembina serta lembaga yang berkompeten dalam pelaksanaan sertifikasi profesi;
3. Melakukan pendampingan pada perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar proses penyelesaian terpantau dan terlaksana tepat waktu sesuai dengan rencana aksi yang disepakati;
4. Melakukan pembinaan pada setiap objek yang diperiksa termasuk pembinaan secara berkala terhadap Perangkat Daerah dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR).